

Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) Dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Libya di Italia Tahun 2016-2018

Oktavian Rahman Koko

vianrahman25@gmail.com

Pembimbing : Sugito, S.IP., M.A.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

ABSTRACT

This research aims to explain how the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in addressing the problems of Libyan refugees residing in Italy from 2016 to 2018. The author describes descriptively by implementing the concept of Transnational Advocacy Networks (TAN) regarding the network of actors who cooperate on an international scale towards an issue. The author has found that UNHCR has successfully played an active and effective role in addressing the problems of Libyan refugees in Italy through the collaboration of UNHCR with NGOs using strategies from Transnational Advocacy Networks (TAN) strategies namely Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics.

Keywords: UNHCR, Transnational Advocacy Networks, Libyan Refugees, Italy.

Pendahuluan

United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) merupakan salah satu organisasi yang masih dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi serta mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Hal ini juga termasuk upaya berkelanjutan untuk mempromosikan dan memperluas kerangka hukum internasional, untuk mengembangkan dan memperkuat sistem suaka, untuk meningkatkan standar perlindungan, untuk mencari solusi yang efektif dan berkesinambungan, hingga berbagai kegiatan lain yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi (UNHCR, *Protecting Refugees and Role of UNHCR*, 2014).

Fungsi UNHCR adalah mengatur dan melindungi hak-hak dari pengungsi yang meliputi jaminan atas suaka atau perlindungan di negara penerima. Berikut ini adalah contoh hak-hak pengungsi yang harus diberikan oleh negara penerima; Kebebasan beragama (Pasal 4), akses dalam pengadilan (Pasal 16), hak untuk mendapat pekerjaan yang layak (Pasal 17 sampai 19), hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak (Pasal 21), hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 22), hak untuk mendapatkan bantuan publik (Pasal 23), hak untuk bergerak bebas dalam batas wilayah negara penerima (Pasal 26), hak untuk diberikan *Travel Document* dan *Identity Papers* (Pasal 27 dan 28), hak untuk tidak dihukum atas usahanya untuk memasuki wilayah negara penerima secara ilegal (Pasal 31), serta hak untuk tidak dikeluarkan atau diusir dari wilayah negara penerima, terkecuali dalam kondisi tertentu (Pasal 32) (UNHCR, *Commentary on The*

Refugee Convention 1951, p.g 27-28., 1997).

Namun tidak sedikit dari para pengungsi yang mengalami masalah dalam dokumen karena mereka memasuki wilayah suatu negara dalam keadaan yang sangat terburu-buru tanpa ada persiapan. Maka respon dari negara penerima seperti yang diatur dalam Pasal 31 *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) yaitu tidak boleh menjerat hukuman atas masuknya pengungsi secara ilegal kedalam wilayah teritorial negaranya tetapi memberi jaminan bagi mereka yang masuk ke negaranya sebagai maksud yang baik atas kedatangannya. Sehubungan masih sangat pentingnya perlindungan terhadap pengungsi ini mengakibatkan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) akan tetap berdiri dan hal ini menjadi alasan tetap berjalannya institusi ini (UNHCR, UNHCR Resettlement Book and Country Chapters, 2018).

Sejak 2014, warga sipil Libya terus menderita sebagai akibat dari konflik, ketidakamanan dan ketidakstabilan politik, serta ekonomi yang runtuh. Dampak yang sangat nyata yaitu terdapat ratusan ribu orang di seluruh negeri sekarang menderita, hidup dalam kondisi yang tidak aman, dengan sedikit atau bahkan tidak memiliki akses untuk mendapatkan kesehatan seperti obat-obatan, makanan, air yang bersih, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya operasi militer yang membuat warga sipil Libya tidak merasa aman dan terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang membuat nyawa mereka sangat terancam semakin memperkuat niatan warga sipil Libya untuk melarikan diri. Lebih dari setengah juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik dan banyaknya kelompok-kelompok bersenjata disekitar mereka. Tidak adanya lembaga pemerintah domestik Libya yang berfungsi dan kegagalan dalam hukum dan ketertiban telah memberikan lahan subur untuk menjamurnya jaringan kriminal di Libya,

termasuk operasi penyelundupan dan perdagangan manusia internasional (UNHCR, Expanded Response in Libya, 2017).

Seiring berjalannya waktu dan bersamaan dengan krisis di wilayah Timur Tengah serta Afrika Utara, terjadilah ketidakaturan arus migrasi masuk dalam wilayah Italia. Migran yang akan pergi ke Italia melalui jalur laut berada dalam tingkat keamanan yang sangat minim, hal tersebut dikarenakan akomodasi yang kurang memadai. Dengan begitu tingkat keselamatan migran di laut tidak dapat dijamin dan kondisi dapat berubah menjadi fatal sewaktu-waktu. Minimnya tingkat keselamatan dikarenakan penyelundup tidak memberi jaminan keselamatan sama sekali meski mereka harus membayar mahal yaitu antara 1000 hingga 2000 dinar dan bahkan 3000 dinar. Negara Libya sejauh ini merupakan titik transit paling penting bagi para pengungsi dan migran yang ingin mencapai Eropa, dengan lebih dari 90% kedatangan laut ke Italia telah berangkat dari Libya. Lebih dari 180.000 orang mencapai Italia melalui laut pada 2016 - ini merupakan peningkatan 18% dibandingkan periode yang sama pada 2015 (53.842 orang). Pada pertengahan Mei 2017, sekitar 45.750 orang mencapai Italia melalui laut, yang juga merupakan peningkatan 30% dari periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya, pada 2016 tercatat terdapat peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 109% kedatangan laut anak-anak yang tidak didampingi dan dipisahkan (25.846 orang) dibandingkan dengan 2015 (12.360 orang) dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2017 hingga tahun-tahun berikutnya (Bonfati, 2017).

Perdebatan secara keseluruhan antara Italia dan negara-negara Eropa lainnya yaitu seputar migrasi yang terjadi di negara-negara Eropa pada umumnya, dan terkhusus di Italia. Italia dan negara-negara Eropa lainnya saat ini lebih berfokus pada bagaimana mengatasi gelombang migran yang tidak diinginkan. Kemudian,

bagaimana mengelola kebijakan arus migrasi, yang tidak hanya melibatkan dengan arus masuk campuran antara orang yang melarikan diri dari perang, penganiayaan hingga kelaparan. Kebijakan yang diharapkan nantinya dapat mengatur dan memungkinkan migrasi yang terjadi dapat menjadi bagian integral dari manajemen migrasi serta tidak merugikan pihak Pemerintah Italia (Ministry, 2017).

Pemerintah Italia telah lama menuntut untuk waktu yang lama berbagi tanggung jawab yang adil terkait penyelamatan masyarakat Libya yang berada di Mediterania Tengah, termasuk penerimaan, proses klaim perlindungan, serta manajemen kehadiran migran gelap dan kembalinya mereka. Pemerintah Italia sendiri telah menerapkan kebijakan terbaru yaitu menyangkal pendaratan hingga memulangkan paksa masyarakat Libya yang datang ke Mediterania Tengah dan menjadikan ini sebagai alat penekan untuk mencapai pembagian tanggung jawab di bidang suaka dan migrasi paling tidak bertanggung jawab. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan yang tidak perlu pada wanita, anak-anak, hingga masyarakat yang sudah rentan usianya, karena mereka telah menghabiskan sumber daya di Mediterania Tengah. Maka dari itu, berbagai pihak dimulai dari organisasi regional seperti Uni Eropa hingga organisasi Internasional seperti UNHCR yang turut ikut serta didalam penyelesaian permasalahan migrasi pengungsi Libya di Italia. (Ministry, 2017).

Uni Eropa sendiri sedang menghadapi krisis pengungsi terbesar sejak akhir Perang Dunia II. Arus migrasi meningkat secara signifikan pada tahun 2015, terutama melalui rute Mediterania bagian tengah. Angka yang melewati Uni Eropa yang dikenal sebagai rute Mediterania bagian timur mencapai 182.740. Angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 (Commissions, 2015).

Keterkaitan Pemerintah Italia dengan Uni Eropa yaitu Uni Eropa sebagai organisasi

regional yang menaungi negara-negara di Eropa ikut turun tangan dalam hal ini, agar memberi kepastian hukum dalam menerima pengungsi. Uni Eropa selaku organisasi regional Eropa melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu menangani masalah pengungsi di negara anggota termasuk di Italia, yaitu melalui pembentukan EASO (*European Assylum Support Office*) agar permasalahan pengungsi tidak hanya menjadi beban atau permasalahan bagi Italia namun juga tanggung jawab regional yaitu tanggung jawab Uni Eropa (Commissions, 2015).

Dari beberapa pemaparan penjelasan diatas, penulis ingin melihat bagaimana upaya dan langkah konkrit dari pembuat kebijakan internasional (yang dalam hal ini adalah UNHCR) yang berfokus pada peran, keterlibatan, serta langkah lebih lanjut terhadap permasalahan pengungsi Libya di Italia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah “bagaimana peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dalam menangani permasalahan pengungsi Libya di Italia pada tahun 2016-2018?”

1. Konsep Organisasi Internasional

Meningkatnya isu transnasional dan ketidakmampuan suatu negara dalam menuntaskan permasalahan di negaranya sendiri menjadi salah satu alasan organisasi internasional terus berkembang pesat pada abad ke-20. Perkembangan ini menunjukkan bahwa di dalam hubungan internasional, organisasi internasional memiliki pengaruh yang cukup kuat melalui kontribusi-kontribusi yang diberikan dalam membantu negara menyelesaikan suatu permasalahan.

Teuku May Rudy menjelaskan bahwa “*organisasi internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta*

diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Malahayati, 2015).

Definisi lain juga diberikan oleh Clive Archer yaitu organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang merupakan hasil dari kesepakatan antar anggotanya (pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat) agar kepentingan mereka dapat tercapai. Selain memberikan definisi organisasi internasional, Clive Archer menjelaskan peran organisasi internasional ke dalam tiga poin, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai instrumen (alat/sarana) yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan, mengurangi intensitas konflik (jika ada), dan menyelaraskan tindakan antar negara dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Organisasi internasional sebagai arena (forum/wadah) yang berguna untuk menghimpun komunikasi dan menginisiasi pembuatan keputusan atau perjanjian internasional secara bersama-sama.
3. Organisasi internasional sebagai pelaku (aktor) yang bertujuan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional (Manik, 2013).

Setelah melihat definisi-definisi organisasi internasional beserta perannya, berikut adalah fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional pada skala internasional menurut Karen Mingst:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara negara/aktor.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan.

3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.
6. Membentuk rezim internasional (Sugito, 2016).

Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR memberikan kontribusinya semaksimal mungkin dengan mengkoordinir banyaknya pengungsi Libya yang tersebar di beberapa wilayah Italia serta bekerjasama dengan beberapa organisasi dan lembaga pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. UNHCR terus berusaha agar target dalam solusi berkelanjutan dapat terlaksana melalui repatriasi sukarela, integrasi lokal dan *resettlement* sehingga permasalahan pengungsi di Italia dapat terselesaikan sesegera mungkin.

2. Konsep Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak lama dan masih terus berlangsung sampai saat ini di dalam hubungan internasional. Hampir setiap negara di dunia akan terus terpengaruh oleh fenomena migrasi. Migrasi pun tidak lepas kaitannya dengan isu-isu global seperti pembangunan, kemiskinan, dan hak asasi manusia. Selain itu migrasi juga dapat menciptakan berbagai macam tantangan yang signifikan (Koser, 2007).

Migrasi Internasional merupakan salah satu jenis migrasi yang dibagi berdasarkan ruang atau wilayahnya, yang mana dapat diartikan sebagai bentuk mobilitas suatu individu atau kelompok yang melewati batas wilayah negara dan budaya (Kartikasari, 2015). Migrasi internasional hingga saat ini juga mempengaruhi negara-negara di dunia. Ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan

terjadinya migrasi, namun pada migrasi internasional terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor demografi, iklim ataupun politik di negara asal misalnya seperti kondisi negara yang terkena bencana besar, konflik, perang, ataupun terjadinya tindakan persekusi.

Namun disisi lain migrasi juga sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan aktivitas migrasi internasional untuk bekerja, berikut adalah klasifikasi migran:

1. Migran tetap termasuk para pekerja pendatang beserta keluarganya yang menyusul.
2. Pekerja kontrak sementara yaitu mereka yang menetap di negara penerima dalam kurun waktu tertentu dan biasanya orang-orang yang tidak/semi terdidik.
3. Orang-orang professional dengan izin tinggal sementara yang merupakan orang-orang terlatih, bekerja dari satu negara ke negara lain.
4. Migran ilegal, mereka yang masuk ke suatu negara tanpa izin dan tidak memiliki dokumen yang lengkap.
5. Pencari suaka atau *Assylum Seeker*, yaitu mereka yang masuk ke negara lain dan mengajukan izin tinggal untuk mencari perlindungan internasional, dan merupakan orang yang telah melarikan diri dari penganiayaan di negara asalnya dan mencari tempat yang aman di negara yang berbeda, tetapi belum menerima pengakuan atau status hukum apa pun.
6. Pengungsi, mereka yang diakui statusnya sebagai pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 yang juga mencari perlindungan internasional, yaitu orang-orang yang berada di luar wilayah negara dimana mereka menjadi warga negaranya atau di luar wilayah tempat tinggalnya semula (*former habitual residence*) (Pratiwi, 2007).

Setelah melihat klasifikasi tersebut, tentu saja terdapat alasan mengapa mereka melakukan aktivitas migrasi yang didorong oleh beberapa faktor. Terdapat faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan terjadinya proses migrasi.

Faktor pendorong adalah sumber daya alam di negara asal yang terlihat semakin minim persediaannya, semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, adanya persekusi yang dilatarbelakangi oleh politik, agama, suku ataupun adat istiadat di daerah asal, adanya tekanan atau paksaan dalam diri untuk meninggalkan daerah asal, atau untuk tujuan menyelamatkan diri dari pertikaian, bencana alam dan lainnya (Pratiwi, 2007).

Faktor penarik adalah adanya prediksi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, kondisi daerah tujuan yang dapat memberikan rasa aman dan damai, banyaknya sarana yang dapat dijadikan peluang untuk berlindung atau adanya aktifitas-aktifitas yang dianggap lebih menarik dibanding aktifitas di daerah asal (Pratiwi, 2007).

3. Model Transnational Advocacy Networks (TAN)

Transnational Advocacy Network menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu. Aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat (Hubungan, 2011). Para aktor ini bekerjasama dengan cara yang terorganisir untuk mengangkat isu maupun norma-norma atau fenomena baru.

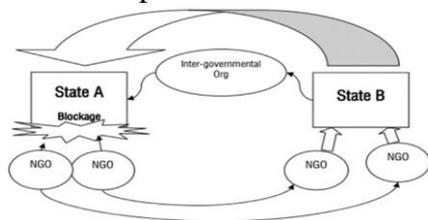
Menurut Keck & Sikkink, Konsep *Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisir untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan (Margaret E. Keck, 1988).

Aktor-aktor yang ada didalam konsep *Transnational Advocacy Network*

tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan Jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan (Margaret E. Keck, 1988)

Jaringan tersebut menjadi semakin penting karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi. Dalam berkampanye, mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang pelestarian lingkungan ataupun sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan (Margaret E. Keck, 1988).

Gambar 1.1 : Implementasi dari TAN



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13 (Margaret E. Keck, 1988).

Pola atau model interaksi aktor dalam TAN adalah *Boomerang Pattern*. *Boomerang Pattern* muncul sebagai pola atau model interaksi antar aktor dalam TAN sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah-langkah alternatif dengan membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya, dan

juga mempengaruhi pemerintahan di negaranya dari luar.

Untuk melaksanakan hal ini, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan TAN ke dalam empat macam, yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Pertama *Information Politics*, yaitu kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan ke mana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh yang besar. Kemudian yang kedua, dalam strategi *Symbolic Politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas. Anggota dari jaringan juga dapat menggunakan strategi *Leverage Politics* yang dimana anggota dari jaringan tersebut mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Strategi yang terakhir yaitu, anggota jaringan juga dapat menggunakan strategi *Accountability Politics* yang dimana komunitas ataupun anggota dari jaringan tersebut dapat menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka (Margaret E. Keck, 1988).

Menghubungkan model TAN (*Transnational Advocacy Networks*) dari Keck dan Sikkink dengan konsep organisasi internasional dari Karen Mingset dapat dilihat dari bagaimana UNHCR sebagai organisasi internasional seharusnya dapat mengkoordinasi aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama (organisasi internasional pada skala internasional menurut Karen Mingst poin nomor 4) dengan cara melakukan *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, serta *Accountability Politics* untuk membentuk opini publik

terhadap isu pengungsi masyarakat Libya di Italia (sesuai dengan model *Transnational Advocacy Networks* menurut Keck dan Sikkink).

Hasil Penelitian

1. Strategi *Information Politics*

Dalam upaya melalui strategi *Information Politics* melalui website resmi dan berbagai media sosial yang dimiliki, telah terlampir bahwa UNHCR hadir sebagai inisiator dalam selama semua fase prosedur penurunan, baik di lokasi hotspot dan non-hotspot di beberapa lokasi di Italia selatan. Tim lapangan UNHCR memberikan dukungan kepada pihak berwenang, memberikan informasi tentang perlindungan internasional dan skema relokasi kepada Uni Eropa, serta mengidentifikasi orang-orang dengan kebutuhan spesifik. Setelah mendarat, staf UNHCR memberikan selebaran baru tentang perlindungan internasional kepada para pendatang baru dan kemudian melakukan sesi penyediaan informasi tatap muka. Informasi awal dikirim segera setelah pendatang baru diidentifikasi sebelumnya, sementara informasi mendalam diberikan setelah individu-individu tersebut telah terdaftar (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Sebagian besar kedatangan laut terus pergi dari Libya (sekitar 90%). Pengungsi yang datang telah melaporkan kejadian pelecehan, termasuk penculikan dan penyiksaan, yang terjadi dalam perjalanan melalui gurun Sahara dan di Libya. Lebih sedikit kedatangan berangkat dengan kapal dari Turki, Aljazair, Tunisia, dan Yunani, tetapi Libya tetap menjadi negara keberangkatan utama dengan Sabratha menjadi titik keberangkatan paling umum. Kebanyakan pendatang baru mencapai pantai Italia setelah operasi SAR dilakukan di laut oleh berbagai aktor, termasuk Angkatan Laut Italia, Penjaga Pantai Italia, kapal-kapal oleh negara lain dan berbagai LSM. Terdapat sedikit peningkatan kedatangan otonom di pantai-pantai Sardinia dan Sisilia barat, dimana

kebanyakan orang yang mencapai pantai secara mandiri di daerah-daerah ini berasal dari Aljazair dan Tunisia (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi *Information Politics* juga dilakukan melalui menentukan status pengungsi, yaitu UNHCR melakukan verifikasi data. Verifikasi dilakukan UNHCR bersama pemerintah untuk menentukan apakah seseorang merupakan pengungsi atau bukan, berdasarkan Konvensi status pengungsi 1951. Verifikasi tersebut melalui tahapan yang dilakukan UNHCR dengan pembuktian terhadap hal-hal mengenai keadaan pencari suaka, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri pencari suaka. Setelah itu UNHCR mencari kesesuaian antara definisi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan fakta-fakta yang diberikan oleh pencari suaka. Setelah dilakukannya verifikasi oleh UNHCR, maka UNHCR dapat menentukan bantuan yang akan didapat oleh pengungsi sesuai dengan hak dan kewajiban pengungsi. Adapun proses verifikasi yang dilakukan UNHCR mengenai tahapan RSD adalah registrasi dan aplikasi untuk RSD. Setelah proses registrasi telah dijalankan maka pencari suaka dapat melakukan wawancara (Agency, Refugee Status Determination, 2018).

Dalam wawancara tersebut UNHCR akan membaca informasi yang diberikan pencari suaka saat registrasi, dokumen-dokumen pendukung, mencari informasi soal situasi negara asalnya, mengidentifikasi alasan kepergiannya, apakah ada informasi yang belum tersedia, dan sebagainya. Setelah pengungsi melewati verifikasi dan dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR, sebagaimana mandat UNHCR adalah menyediakan perlindungan internasional bagi pengungsi. Dalam kasus pengungsi Libya yang ada di Italia, UNHCR mencari solusi permanen (*durable solution*) melalui integrasi lokal (*local integration*), repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) atau pemukiman

kembali di negara ketiga (*resettlement*) (Agency, Refugee Status Determination, 2018).

2. Strategi *Symbolic Politics*

Dalam penerapan strategi *Symbolic Politics*, UNHCR telah membuat serangkaian kegiatan atau berbagai inisiatif yang akan menjadi katalisator bagi UNHCR untuk memperkuat jaringannya bersama dengan aktor-aktor terkait dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Libya yang ada di Italia.

Pada 11 Desember 2017, UNHCR memiliki inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Italia yang berpartisipasi dalam Skema Akomodasi. Pemerintah Italia merefleksikan pencapaian penting dari program ini, dan berbagi pengalaman positif dan pelajaran yang didapat sambil mencari cara untuk memastikan kelanjutan program ditahun-tahun berikutnya. Pemerintah Italia berharap pada akhirnya bisa menjadi proyek yang berkelanjutan di bawah kendali kota. UNHCR akan bekerja dengan pemerintah kota dan pemerintah pusat sepanjang 2017 untuk secara bertahap mengalihkan implementasi program ke pihak berwenang (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

Program-program ini juga membantu integrasi mereka yang pada akhirnya akan tetap berada di Italia. Peninggi di Italia sepakat bahwa pekerjaan masih harus dilakukan untuk mendukung para pencari suaka dan pengungsi layanan akses yang lebih baik, dan untuk mendukung kemandirian. Upaya-upaya ini semakin mendesak dengan meningkatnya jumlah orang yang diakui sebagai pengungsi di Italia sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas Layanan Suaka untuk meninjau kasus-kasus, serta peningkatan tingkat pengakuan dari 26% pada 2016 menjadi 46% pada 2017. Pada 2017, sekitar 10.364 masyarakat menerima status pengungsi, hampir empat kali lebih

banyak dari tahun 2016 (yaitu sekitar 2.700). Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa program relokasi ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya telah ditutup, dan dengan demikian banyak pemohon profil pengungsi yang kasusnya ditinjau di Italia (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

UNHCR pada tahun 2017 telah mengumumkan evakuasi 162 pengungsi yang sangat rentan dari Libya ke Italia, termasuk anak di bawah umur dan perempuan yang ditawan dalam jangka waktu yang lama. Setelah dibebaskan dari pusat penahanan, mereka dikawal ke Tripoli oleh staf UNHCR yang berlokasi di Libya dan kemudian dibawa Italia, di mana mereka mendarat di sebuah pangkalan militer dekat Roma dan kemudian dipindahkan oleh pihak berwenang Italia. Setelah tiba, semua pengungsi menjalani pemeriksaan medis, sebelum memulai prosedur identifikasi, mereka diberi pakaian musim dingin dan makanan panas. Staf UNHCR, termasuk mediator budaya dan ahli hukum, hadir pada saat kedatangan untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang dievakuasi tentang prosedur permohonan suaka. Selanjutnya para pengungsi dipindahkan ke beberapa fasilitas penerimaan. Bantuan dan penerimaan kemanusiaan disediakan oleh Konferensi Episkopal Italia, melalui Caritas. Cochetel menyimpulkan dengan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan harus dimasukkan dalam kerangka kerja intervensi yang lebih luas yang bertujuan membangun sistem suaka, mengelola migrasi dengan lebih baik, dan menangani arus kompleks migran dan pengungsi di Libya dan sepanjang rute ke Italia (Agency, UNHCR: First evacuation of 162 vulnerable refugees from Libya to Italy, 2017).

Selain itu, UNHCR memanfaatkan momentum-momentum tersebut sebagai katalisator dalam strategi *Symbolic Politics* dengan bekerjasama dengan UNICEF, IOM, EUROSTAT, dan OECD dalam

meluncurkan data tentang kesenjangan tentang pengungsi, pencari suaka, migran dan orang-orang terlantar di Italia dikarenakan dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan jutaan anak-anak migran. UNHCR bersama dengan kelima lembaga tersebut diatas telah menunjukkan bagaimana data mendasar untuk memahami tren dalam migrasi global dan mengembangkan kebijakan untuk mendukung kelompok yang paling rentan seperti anak-anak. Informasi tentang usia hanya tersedia untuk sekitar 56% dari populasi pengungsi di bawah mandat UNHCR; Hanya sekitar 20% dari negara dan wilayah yang mengumpulkan data tentang pengungsi yang dipindahkan secara internal karena konflik memiliki data yang dirinci berdasarkan usia; Sekitar seperempat negara dan wilayah tidak memiliki data yang dipilah berdasarkan migran berdasarkan usia, termasuk 43% dari negara dan wilayah di Afrika; Kurangnya informasi tentang anak-anak migran dan pengungsi merampas perlindungan dan layanan yang diperlukan anak di bawah umur.

Maka dari itu, UNHCR, UNICEF, IOM, EUROSTAT, dan OECD mengundang negara-negara anggota untuk menanggapi kesenjangan data dan kesaksian tentang anak-anak migran, dan untuk memasukkan unsur-unsur khusus ini untuk anak-anak di *Global compact* untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur, yaitu:

- Memisahkan data berdasarkan usia dan jenis kelamin
- Mengatasi masalah utama yang memengaruhi anak-anak yang bermigrasi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka;
- Manfaatkan lebih baik data yang ada dan bagikan;
- Mengkoordinasikan pekerjaan data di dalam negara dan lintas batas;
- Lakukan upaya khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang anak-anak (Agency, Joint UNICEF-UNHCR-OIM-

EURSTAT and OECD release: Strong data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and without access to basic services, 2018).

3. Strategi *Leverage Politics*

Dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR telah berupaya dalam melakukan integrasi lokal terhadap pengungsi Libya yang berada di Italia. Menurut ketentuan yang relevan dalam hukum internasional dan Uni Eropa, para pengungsi harus diberikan akses ke sejumlah hak yang merupakan kunci integrasi di negara suaka yang sejajar dengan warga negara Italia atau Eropa. Namun, terdapat beberapa kekurangan baik dalam undang-undang dan praktik Italia yang dapat menghambat upaya pengungsi untuk menjadi mandiri. Kebijakan integrasi yang ada, yang tidak memperhitungkan kerugian awal pengungsi di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan warga negara Italia, membatasi integrasi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu langkah-langkah yang menawarkan dukungan khusus kepada pengungsi yang mengakses pasar tenaga kerja perlu diluncurkan. Terlebih lagi, dalam banyak kasus, para pengungsi yang telah diberikan suatu bentuk perlindungan internasional mungkin tidak lagi mendapat manfaat dari bantuan yang diberikan kepada para pencari suaka dan oleh karena itu berjuang untuk memiliki akses ke perumahan (INTEGRATION, 2017).

Mengingat Sistem SPRAR memiliki kapasitasnya yang rendah dan efisiensinya terbatas untuk membantu para pengungsi dalam mendapatkan akomodasi yang memadai, sehingga menyebabkan pengungsi miskin dapat menjadi tunawisma. Selain itu, kerangka hukum saat ini tidak melihat implementasi langkah-langkah yang diarahkan untuk mengatasi hambatan administrasi spesifik yang dihadapi pengungsi. Banyak pengungsi, misalnya, kekurangan dokumen atau sertifikat yang tidak dapat mereka peroleh dari negara asal mereka, tetapi mereka

diminta untuk memproduksi untuk dapat melaksanakan sejumlah hak, termasuk pengakuan kualifikasi pendidikan dan profesional mereka, atau menjadi bisa menikah. Permintaan dokumen yang membuktikan hubungan keluarga serta keterlambatan menilai aplikasi juga menimbulkan hambatan untuk reuni keluarga (CO-OPERATION, 2018).

UNHCR juga percaya bahwa keterlibatan para pengungsi dalam kehidupan politik akan menumbuhkan rasa memiliki mereka di negara suaka mereka dan akan memfasilitasi integrasi mereka. Namun, undang-undang Pemerintah Italia saat ini tidak memberikan warga negara ketiga hak untuk memilih, termasuk dalam pemilihan lokal. Mengenai pencari suaka, UNHCR mendukung inisiatif, termasuk dalam program SPRAR atau *the System for the Protection of Asylum Seekers and Refugees*, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri yang diarahkan untuk memajukan integrasi mereka jika mereka diakui sebagai pengungsi, seperti biaya kuliah bahasa Italia, pendidikan kewarganegaraan, penilaian keterampilan profesional dan pelatihan kejuruan. UNHCR percaya bahwa langkah-langkah ini dapat membantu mendukung pencari suaka karena mereka harus mengambil keputusan tentang masa depan mereka dan untuk mempromosikan hubungan positif dengan masyarakat setempat. Namun, begitu individu meninggalkan program SPRAR, akses ke langkah-langkah dukungan tambahan akan terbatas dan karenanya prospek integrasi dapat melambat (Parliament, 2017).

Selain itu, dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR juga telah menekan Pemerintah Italia dalam beberapa tahun terakhir untuk menerima beberapa ratus pengungsi untuk dimukimkan kembali dari negara ketiga di mana mereka tidak dapat mengakses perlindungan yang memadai dan jangka panjang. UNHCR percaya bahwa kemungkinan pengungsi yang berhasil dimukimkan kembali berhasil di dalam komunitas lokal adalah tinggi di

sejumlah daerah di mana mereka telah dipindahkan. Inisiatif pemukiman kembali percontohan ini telah menyoroti fakta bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan dukungan integrasi untuk pengungsi yang bermukim kembali. Oleh karena itu, pembelajaran dapat diambil untuk mempromosikan inisiatif serupa di tempat lain. Lebih jauh, UNHCR menyatakan penghargaan atas penunjukkan baru-baru ini, dalam kabinet yang baru dibentuk, dari Menteri untuk Kerjasama Kerjasama dan Integrasi, dan berharap bahwa Kementerian yang baru akan memelopori kebijakan yang memajukan integrasi pengungsi di Italia (Parliament, 2017).

UNHCR sangat prihatin dengan penggunaan bahasa yang sering dan semakin meningkat dalam wacana publik yang dikalkulasi untuk memicu terjadinya *xenophobia* dan intoleransi. Hal ini dapat merusak hubungan positif antara masyarakat lokal Italia dan yang bukan, sehingga dapat memicu dampak negatif pada pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga telah melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal integrasi ini, yaitu melalui Program Dewan Eropa tentang Paspor Eropa untuk Kualifikasi Pengungsi (EQPR). Dimana program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan kualifikasi pengungsi meskipun tidak ada dokumentasi yang lengkap dan untuk mengenali kualifikasi pengungsi dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat Eropa melalui pendidikan dan pekerjaan (Information, 2018).

Dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR juga melakukan peran dalam Repatriasi sukarela (*Voluntary repatriation*). Pada akhir Maret 2018, UNHCR telah meluncurkan permohonan mendesak untuk 1.300 tempat yang berfungsi untuk pemukiman kembali para pengungsi yang sangat rentan yang terdampar di Lautan Tengah. Lebih dari 1.500 pengungsi dan migran kehilangan nyawa saat mencoba menyeberangi Laut Tengah dalam tujuh bulan pertama pada

tahun 2018. Pada bulan Juni dan Juli berikutnya, dikonfirmasi lebih dari 850 orang dan menjadikan Mediterania sebagai rute laut yang paling mematikan di dunia (Agency, UNHCR sounds alarm as Mediterranean Sea deaths pass 1,500 mark, 2018).

Penerapan strategi *Leverage Politics* dalam peranan UNHCR lainnya yaitu melalui Program Pemukiman Kembali (Resettlement). Tugas utama UNHCR dalam pemukiman kembali adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi pengungsi. Keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Eropa tentang skema pemukiman kembali telah mengirimkan sinyal kuat mengenai pentingnya solidaritas dan pembagian tanggung jawab antara Negara-negara Anggota Uni Eropa. UNHCR selalu mendukung implementasi yang tepat waktu dari skema relokasi Uni Eropa. UNHCR didorong oleh penekanan yang diberikan oleh Pengadilan pada kebutuhan untuk mendukung Negara-negara Anggota yang berada di bawah tekanan dalam penerimaan pencari suaka. UNHCR menggarisbawahi perlunya Negara-negara Anggota untuk mempercepat proses untuk semua pencari suaka yang memenuhi syarat yang berada di Italia, dan untuk sepenuhnya memenuhi komitmen yang telah mereka tandatangani sebagai isyarat nyata (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

4. Strategi *Accountability Politics*

Dalam penerapan strategi *Accountability Politics*, UNHCR telah melakukan peran *controlling* baik secara kelembagaan hingga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Sejak awal tahun 2017, terdapat lebih dari 1.700 kematian dari pengungsi dan hal tersebut menandakan bahwa tingkat kematian dan pengungsi hilang selama penyeberangan di Laut Mediterania telah meningkat secara drastis.

Hanya pada bulan September ditahun tersebut, satu dari delapan orang meninggal atau hilang dalam upaya untuk mencapai Eropa melalui Mediterania tengah, tetapi sebagian besar karena pengurangan kapasitas pencarian dan penyelamatan. Selain kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pencarian dan penyelamatan, UNHCR dan IOM telah mengusulkan perjanjian regional yang dapat dilakukan yang akan membuat operasi pendaratan dan penerimaan dapat diprediksi dan cepat (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

Sejak 2017 juga, UNHCR telah menjalin kemitraan dengan sejumlah LSM di Italia, dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian perlingkungannya, dengan fokus khususnya pada pencegahan dan tanggapan SGBV, perlindungan dan integrasi anak. Mitra UNCHR yaitu Uni Eropa, AIDOS, ARCI, Cambalache, Caritas (Consortio Communitas), Carta di Roma, CIDAS, Consiglio Italiano Rifugiati, Di.RE, Fondazione Adecco, Intersos, LILA Catania, MEDU, dan Universitas Pollenzo dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di Italia (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

UNHCR dan IOM juga mendesak para pemimpin Eropa untuk mengarahkan diskusi minggu ini pada solusi praktis yang harus diadopsi dengan sangat mendesak dan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa tanggung jawab dibagi antara negara-negara Eropa. Pada saat yang sama, UNHCR dan IOM juga menyambut kemajuan yang dibuat sejauh ini oleh beberapa Negara Anggota Uni Eropa untuk sampai pada pembagian tanggung jawab dalam mengimplementasikan solusi untuk pencarian, penyelamatan, dan pendaratan migran pasca-pengungsi (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

Pada 6 Mei 2017, UNHCR menyambut dengan baik komunikasi dari Menteri Luar Negeri Angelino Alfano yang ingin berkontribusi pada kegiatan bantuan kemanusiaan Badan di Libya dengan 10 juta euro. Oleh karena itu, Pemerintah Italia menegaskan komitmennya yang besar kepada para pengungsi, khususnya pengungsi Libya yang ada di Italia dengan mengkonsolidasikan dan meningkatkan kontribusinya bagi UNHCR. UNHCR telah efektif menjalankan strategi *Accountability Politics*, yang ditandai dengan Pemerintah Italia sebagai anggota "*Donors Club*" yang menyediakan dana kepada UNCHR setidaknya 20 juta euro. Jumlah kematian di Mediterania Tengah pada tahun 2016 adalah yang tertinggi yang pernah tercatat, sekitar 5.000, sedangkan 2017 adalah tahun yang sangat mengkhawatirkan dengan lebih dari 1.000 korban (Agency, The United Nations Agency for Refugees welcomes the strong and concrete support offered by the Italian Government for the humanitarian assistance plan in Libya, 2017).

Selain itu, UNHCR menyambut baik peluncuran program "*Koalisi Pengungsi Eropa*" yang diinisiasi oleh Uni Eropa. Dengan cara berkoalisi, yakni dengan menyatukan perwakilan pengungsi yang tinggal di berbagai negara Eropa, bertujuan untuk memberikan suara kepada para pengungsi di Eropa dan untuk memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dengan lebih baik dalam keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini juga akan mempromosikan tindakan konkret yang ditujukan untuk memperkuat hak-hak pengungsi dan meningkatkan proses integrasi di negara tuan rumah (Agency, UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition", 2018).

Pertemuan pertama yang diselenggarakan berkat dukungan dari Kota Milan dan bekerja sama dengan kelompok Nirlaba, Diplomat Independen, dan UNHCR, diadakan dari 13 hingga 15 Desember 2017. 15 perwakilan pengungsi, yang saat ini tinggal di Austria, Belgia,

Finlandia, Jerman, Italia, Lithuania, Swedia, dan Hongaria, membahas tujuan program Koalisi ini dan dapat menyiapkan *platform* di mana mereka akan dapat menangani masalah yang berkaitan dengan kebutuhan perlindungan dan integrasi para pengungsi di Eropa. Di antara anggota kelompok, yang berasal dari Libya, Afghanistan, Suriah, Somalia, Irak, Aljazair, Nigeriaia, Ethiopia, dan Rusia, ada guru, jurnalis, penulis, dan aktivis LGBTI (Agency, UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition", 2018).

UNHCR berharap bahwa langkah-langkah yang direncanakan untuk menciptakan sistem yang efektif untuk inklusi sosial para pencari suaka dan pengungsi akan didukung oleh kemauan dan sumber daya yang memadai di pihak lembaga. Sementara investigasi sedang berlangsung dan tanggung jawab agresi ini sedang diklarifikasi, UNHCR dengan kuat memantau setiap upaya yang tidak bertanggung jawab untuk menggerakkan diskriminasi dan mengeksploitasi insiden serius seperti ini, dan menyerukan kejahatan kebencian untuk secara eksplisit distigmatisasi (Agency, UNHCR statement on the wounding of the young Malian Bouyagui Konate: Italy is committed to promoting concrete actions to prevent intolerance and indifference towards refugees and asylum seekers, 2018).

UNHCR juga menyambut baik dari persetujuan yang dibuat oleh Majelis Umum PBB yang menginisiasi perjanjian *Global Compact* untuk migrasi yang aman teratur. *Global Compact* adalah perjanjian internasional pertama yang dinegosiasikan antara pemerintah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup semua dimensi migrasi internasional. Hal ini berakar pada kerangka peraturan yang ada tentang hak asasi manusia (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Global Compact on Refugees didasarkan pada sistem peraturan perlindungan internasional yang ada untuk pengungsi - yaitu orang-orang yang

melarikan diri dari konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menanggapi arus besar pengungsi, dengan dukungan yang lebih sistematis dan kuat bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, serta untuk masyarakat setempat (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Keputusan untuk secara resmi menyetujui pakta migrasi di Majelis Umum merupakan kelanjutan dari penerapannya selama konferensi antar pemerintah pada 10 Desember 2018 di Marrakech. Perjanjian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam menanggapi mobilitas manusia - arus migrasi di satu sisi dan gerakan pengungsi di sisi lain. *Global Compacts* ini lahir dari Deklarasi Pengungsi dan Migran New York pada September 2016, dan dikembangkan sesuai dengan proses paralel selama dua tahun terakhir. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja yang tidak mengikat untuk meningkatkan kerja sama internasional. UNHCR akan mendukung implementasi perjanjian tentang migrasi melalui keikutsertaannya dalam proses migrasi PBB, bersama dengan organisasinya yang lain (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Sepanjang 2018, terjadi perubahan signifikan pada pola rute yang diambil oleh pengungsi dan migran menuju Eropa. Untuk paruh pertama, lebih banyak orang tiba di Yunani daripada Italia atau Spanyol, di babak kedua, titik masuk utama menjadi Spanyol karena semakin banyak orang mencoba laut yang berbahaya menyeberangi Mediterania Barat (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Selain itu, Pengawal Pantai Libya meningkatkan operasinya dengan hasil sekitar 85% dari mereka yang diselamatkan atau dicegah di Daerah Pencarian dan Penyelamatan Libya (SRR) yang baru didirikan diberangkatkan di Libya, di mana mereka menghadapi penahanan dalam kondisi yang mengerikan (termasuk akses terbatas ke makanan dan wabah penyakit di

beberapa fasilitas, bersama dengan beberapa kematian). Akibatnya, lebih banyak kapal yang berisi pengungsi dan migran berusaha berlayar di luar SRR Libya untuk menghindari penjaga pantai - baik untuk membuat tanah di Malta dan Italia atau setidaknya untuk mencapai wilayah pencarian dan penyelamatan dari yurisdiksi tersebut. Tren ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2019. Meskipun jumlah keseluruhan kematian di laut di Mediterania Tengah lebih dari setengahnya pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat kematian per jumlah orang yang mencoba melakukan perjalanan meningkat tajam. Pada persimpangan dari Libya ke Eropa, misalnya, tarif beralih dari satu kematian untuk setiap 38 kedatangan pada 2017 menjadi satu untuk setiap 14 kedatangan tahun lalu. Korbannya sangat berat di Mediterania Barat, pada rute ke Spanyol, di mana jumlah kematian hampir empat kali lipat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Sebagian besar tren ini tampaknya akan berlanjut pada tahun 2019, dengan akar penyebab dari perpindahan migrasi - seperti pelanggaran hak asasi manusia dan konflik atau kemiskinan - tetap tidak terselesaikan. Bagi banyak orang, penyeberangan laut hanyalah langkah terakhir dalam sebuah perjalanan yang melibatkan perjalanan melalui zona konflik atau gurun, bahaya penculikan dan penyiksaan untuk tebusan, dan ancaman dari para pedagang manusia. UNHCR juga menyerukan kepada Negara-negara untuk berhenti menangkap dan mengembalikan ribuan orang ke negara-negara tetangga tanpa mengizinkan mereka mencari suaka atau menilai secara individu apakah mereka memiliki perlindungan internasional atau kebutuhan kemanusiaan lainnya - sebuah praktik yang dikenal sebagai "push-backs" - serta untuk sangat meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak - ditemani atau sendirian - dan untuk memberikan

dukungan bagi para korban kekerasan seksual dan berbasis gender, serta akses yang lebih baik ke jalur yang aman dan legal sebagai alternatif dari perjalanan berbahaya ini (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pada tahun 2018 juga telah membawa beberapa perkembangan positif. Lebih banyak negara berkomitmen untuk memukimkan kembali pengungsi yang dievakuasi dari Libya, sehingga memungkinkan UNHCR untuk membawa lebih banyak orang ke tempat yang aman melalui Mekanisme Transit Darurat yang didirikan di Niger. Pada akhir tahun, UNHCR membuka Fasilitas Pertemuan dan Keberangkatan di Tripoli, memungkinkan pembebasan lebih banyak orang dari tahanan. Beberapa Negara Anggota Uni Eropa juga berkomitmen untuk relokasi orang yang diselamatkan di Mediterania Tengah - suatu tanda potensi aksi bersama internasional (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Laporan ini juga menyerukan pembentukan mendesak respon regional terkoordinasi dan dapat diprediksi untuk menyelamatkan di laut, serta berbagi tanggung jawab yang lebih besar secara umum. Hal tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas penyelamatan, titik-titik turun yang ditentukan dan dapat diprediksi, lebih solidaritas dan dukungan bagi negara-negara di mana sebagian besar pengungsi dan migran tiba, akses yang lebih baik ke jalur yang aman dan legal (seperti pemukiman kembali, penyatuan kembali keluarga, skema pendidikan dan tenaga kerja), perlindungan yang lebih besar untuk anak-anak tanpa pendamping dan penyintas kekerasan berbasis gender dan gender, dan tindakan lebih keras terhadap pelaku kejahatan terhadap pengungsi dan migran, termasuk pedagang dan penyelundup (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Tepat setelah enam bulan setelah keputusan Italia untuk mengakhiri

pendaratan di pelabuhan masyarakat Italia diselamatkan di lepas pantai Libya, pendaratan setelah penyelamatan di operasi laut (selain dari yang dilakukan oleh Penjaga Pantai Libya atau oleh otoritas Malta atau Italia) terus ditangani pada suatu kasus -dasarkan kasus negara-negara pantai Uni Eropa dalam koordinasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang bersedia mempertimbangkan relokasi. Pada tahun 2018, hal tersebut dapat mengakibatkan pengungsi dan migran harus menunggu beberapa hari sebelum diizinkan untuk turun. Kapal-kapal yang terlibat dalam penyelamatan laut menghadapi ketidakpastian atas akses ke pelabuhan-pelabuhan yang aman di dekatnya dan telah ada beberapa laporan dari para penyintas kapal yang lewat tanpa bantuan sebelum akhirnya diselamatkan. Dalam kasus lain, ada perselisihan antara negara-negara Eropa tentang apakah sebuah kapal dalam kesulitan atau tidak karena melewati sebuah negara bagian pencarian dan penyelamatan, ditambah dengan tuduhan menghindari tanggung jawab mereka untuk melakukan penyelamatan (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Setelah pertengahan Juni tahun 2018, Pasukan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Italia - yang sampai saat itu telah menyelamatkan lebih dari 2.600 orang yang telah meninggalkan Libya pada tahun 2018 - tidak melakukan penyelamatan lebih lanjut di lepas pantai Libya. Demikian pula, kapal-kapal yang dikerahkan ke Operasi Sophia dari *EUNAVFOR Med*, yang hingga Mei telah menyelamatkan lebih dari 2.200 orang, kemudian menyelamatkan hanya satu kelompok lagi antara Juni dan Desember 2018. LSM-LSM yang antara Januari dan Mei bertanggung jawab atas penyelamatan hampir 5.000 orang tiba-tiba menghadapi pembatasan baru yang mengurangi kehadiran mereka di zona penyelamatan. Kapal dagang yang sebelum Juni diselamatkan hampir 600 orang tiba-tiba diminta untuk menyelamatkan lebih dari 700 orang pada Juni saja. Mereka

kemudian menghadapi akses terbatas ke port. Setelah Juni, hanya dua penyelamatan lagi oleh kapal dagang yang menghasilkan 79 orang yang berangkat dari Libya turun di Eropa (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pembentukan SRR berarti sejalan dengan kewajiban yang timbul dari hukum maritim internasional, sebuah negara berkomitmen untuk mengkoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah tersebut dan melaksanakan tanggung jawab utama ketika penyelamatan dilakukan dalam SRR-nya untuk memastikan kerjasama dan koordinasi untuk pendaratan. Namun, hukum maritim internasional tidak menentukan di mana orang yang diselamatkan di wilayah itu harus diturunkan selama pelabuhan itu aman dan pendaratannya dilakukan secepat mungkin secara wajar. UNHCR bersama LSM-LSM dan kapal komersial yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan telah mencatat bahwa pada beberapa kesempatan Penjaga Pantai Libya meminta agar orang yang diselamatkan di perairan internasional diserahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat diturunkan di Libya (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pemukiman kembali tetap menjadi jalur hukum utama bagi para pengungsi dan pada tahun 2018, jumlah pengungsi yang dipindahkan ke Eropa sedikit menurun dari hampir 27.500 pada 2017 menjadi 24.185 pada akhir November, dan di Inggris, Swedia, Prancis, Jerman, dan Norwegia memukimkan sebagian besar pengungsi dengan Suriah sejauh ini merupakan kelompok terbesar yang dimukimkan kembali dari Turki, Lebanon, Yordania, dan Mesir. Warga negara Republik Demokratik Kongo, Eritrea dan Sudan adalah kelompok terbesar berikutnya yang akan dipindahkan. Mengikuti panggilan UNHCR pada bulan September 2017 untuk 40.000 tempat pemukiman kembali tambahan bagi para pengungsi di 15 negara prioritas di sepanjang rute Mediterania Tengah,

negara-negara pemukiman kembali telah menjanjikan 39.698 tempat, di mana 14.450 tempat dijanjikan oleh negara-negara Eropa. Sampai akhir November 2018, 10.182 dari pengungsi ini telah dimukimkan kembali (Agency, UNHCR resumes emergency evacuations of refugees from Libya, 2018).

Karena banyaknya bahaya yang dihadapi pengungsi di Libya, UNHCR telah membentuk Mekanisme Transit Darurat (ETM) bersama dengan pemerintah Niger. Hal ini merupakan mekanisme di mana para pengungsi yang dievakuasi dari Libya dapat sementara ditampung di negara itu sampai mereka dapat dimukimkan di tempat lain. Beberapa negara Eropa, termasuk Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Malta, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Inggris, serta Kanada telah berkomitmen untuk menyediakan tempat-tempat pemukiman kembali dan menerima pengungsi yang dipindahkan yang dievakuasi dari pusat penahanan di Libya ke Niger. melalui ETM. Sekitar 2.879 pengungsi telah dievakuasi dari Libya sejak awal program. Pada 2018, Italia juga mengevakuasi 253 langsung dari Libya. UNHCR menghargai bahwa negara-negara pemukiman telah berjanji untuk menyediakan total 5.456 tempat-tempat pemukiman kembali sejauh ini, tetapi masih banyak komitmen yang masih dibutuhkan (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pengungsi yang berharap untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga di Eropa terus menghadapi hambatan signifikan tahun lalu yang membuat banyak dari mereka terpisah. Hambatan-hambatan ini termasuk definisi restriktif keluarga yang diterapkan oleh beberapa negara, kesulitan mendapatkan akses ke kedutaan yang relevan untuk menerapkan, kurangnya akses ke dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan hubungan keluarga, biaya tinggi yang terlibat dalam proses, dan tertunda atau lebih terbatas akses ke reunifikasi keluarga untuk penerima manfaat perlindungan anak perusahaan.

Beberapa perkembangan positif dan efektif juga dicatat pada tahun 2018, seperti Italia membuka pusat layanan baru di negara-negara utama tempat tinggal pengungsi, termasuk Mesir, Kenya, dan Ethiopia, untuk membantu anggota keluarga pengungsi dengan aplikasi mereka untuk penyatuan kembali keluarga. Penggunaan positif visa kemanusiaan oleh beberapa negara Eropa berlanjut pada 2018 termasuk melalui program-program yang didirikan bersama antara organisasi-organisasi berbasis agama dan pemerintah Belgia, Prancis, dan Italia. Hal tersebut membuktikan bahwa UNHCR dan LSM-LSM terkait telah efektif dan progresif dalam memfasilitasi kedatangan banyak warga negara Libya, Suriah, Eritrea, dan Ethiopia dan mengurangi permasalahan pengungsi Libya yang berada di Italia. (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Semua strategi tersebut di atas telah diimplementasikan sangat baik dan progresif setiap tahunnya (dari 2016 hingga 2018). Namun, penulis melihat dari keempat strategi tersebut di atas, UNHCR paling efektif dan progresif didalam pelaksanaan dan pengimplementasiannya yaitu strategi *Accountability Politics*. Hal ini berangkat dari bagaimana dalam UNHCR secara langsung melakukan kerjasama secara masif dengan Uni Eropa melalui “Koalisi Pengungsi untuk Eropa”, dan UNHCR juga mendapat langsung dari Majelis Umum PBB melalui perjanjian *Global Compact on Refugee* untuk menjadi aktor utama dalam memperkuat kerja sama internasional dalam menanggapi arus besar pengungsi, dengan dukungan yang lebih sistematis dan lebih efektif bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, serta untuk masyarakat setempat, yaitu dengan dibuktikan bahwa terjadi penurunan kedatangan pengungsi dari Libya ke Italia dan peningkatan didalam pemulangan kembali pengungsi Libya dari Italia pada tahun 2016-2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kartikasari, W. (2015). *Migrasi Internasional: Reading Brick*. Yogyakarta.

Nasution, M. A. (1999). *Globalisasi & Migrasi Antarnegara*. Bandung: Alumni Publisher.

Sugito. (2016). *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Phinisi Pers.

UNHCR. (2018, Desember 3). *UNHCR Resettlement Book and Country Chapters*. Diambil kembali dari <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html>

Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weiner, M. (1993). *Security, Stability and International Migration*. Diambil kembali dari https://www.files.ethz.ch/isn/19789/Security_Stability_Migration.pdf

Zaidy, Z. (2017, Juli). "EU Migration Policy Towards Libya: A Libyan Perspective on the Memorandum of Understanding between Italy and Libya,". Diambil kembali dari <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13752.pdf>

Jurnal:

Hammond, T. (2017). The Mediterranean Migration Crisis. *Foreign Policy Journal*, vol.1.

Hubungan, J. W. (2011). Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap. Diambil kembali dari Jurnal WANUA Jurusan Hubungan: <https://docplayer.info/73986243-Bab-i-pendahuluan-1-badan-pusat-statistik-provinsi-bali-statistics-of-bali-province.html>

Hukum, J. (1998, November). Diambil kembali dari Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional: <http://e-journal.uajy.ac.id/9169/1/JURNALHK10659.pdf>

Interior, I. M. (2017, Agustus 27). "Migranti, il patto con la Libia frena gli arrivi: da luglio - 68%". Diambil kembali dari Cruscotto

statistico giornaliero:
<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-26/migranti-patto-la-libia-frenaarrivi-221553.html>

Kington, T. (2017, July 13). "Italy Offers Libyan Mayors €40m to Stem Flow of Migrants". Diambil kembali dari The Times: <http://www.redattosociale.it/Notiziario/Articolo/545544>

Koser, K. (2007). International Migration A Very Short Introduction. *New York: Oxford University Press Inc.*

Malahayati. (2015, Oktober 31). *Hukum Organisasi Internasional Sejarah dan Perkembangannya*. Diambil kembali dari Repository Unimal:
<http://repository.unimal.ac.id/2154/1/ORGANISASI%20INTERNASIONAL.pdf>

Manik, L. F. (2013). *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Menangani Imigran Ilegal Myanmar di Indonesia (2008-2011)*. Diambil kembali dari Repository UNRI:
<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3564/jurnal%20q.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Margaret E. Keck, K. S. (1988). Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International. Dalam *Activists beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics* (hal. 8). Cornell University Press.

Pratiwi, Y. W. (2007). Skripsi: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2007. *Surakarta*.

Paoletti, E. (2012). *Migration Agreements between Italy and North Africa: Domestic Imperatives versus International Norms*. Diambil kembali dari Middle East Institute: <http://www.mei.edu>

Panebianco, S. (2016). The Mare Nostrum Operation and the SAR Approach: The Italian response to address the Mediterranean migration crisis. *Catania: Jean Monnet Centre*.

Toaldo, M. (2015). *Migration Through and From Libya: A Mediterranean Challenge*. Diambil kembali dari Istituto Affari Internazionali working papers:

<https://media.neliti.com/media/publications/90026-ID-none.pdf>

Wahyuni, D. (2013). Migrasi Internasional dan Pembangunan. *Kajian Vol.18 No.4*, 317-318.

Wulandari, A. (2016). Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afghanistan di Pekanbaru(Indonesia) Tahun 2015. *JOM FISIP Vol.3, No.2*, 3.

Report:

Agency, T. U. (2017, Oktober). UNHCR ITALY FACTSHEET. Diambil kembali dari <http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205> Agency, T. U. (2017, Desember 06). Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/commento-alla-stampa-dellunhcr-sulla-sentenza-della-corte-giustizia-europea-sullo-schema-ricollocamento.html>

Agency, T. U. (2017). Solutions for refugees. Diambil kembali dari Chapter 7: <https://www.unhcr.org/50a4c17f9.pdf>

Agency, T. U. (2017, May 06). The United Nations Agency for Refugees welcomes the strong and concrete support offered by the Italian Government for the humanitarian assistance plan in Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/agenzia-delle-nazioni-unite-rifugiati-si-felicita-del-forte-concreto-supperto-offerto-dal-governo-italiano-piano-assistenza-umanitaria-libia.html>

Agency, T. U. (2017, September 26). UNHCR calls for the EU outplacement program to continue. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/unhcr-chiede-continui-programma-ricollocamento-dellue.html>

Agency, T. U. (2017, Oktober). UNHCR ITALY FACTSHEET. Diambil kembali dari <http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205>.

Agency, T. U. (2017, March 16). UNHCR UPDATE #10. Diambil kembali dari ITALY: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53633>

Agency, T. U. (2017, December 11). UNHCR urgently requests 1300 places available for the resettlement of the most vulnerable refugees from Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/unhcr-chiede-urgenza-1300-posti-disponibili-reinsediamento-dalla-libia-dei-rifugiati-piu-vulnerabili.html>

Agency, T. U. (2017, December 22). UNHCR: First evacuation of 162 vulnerable refugees from Libya to Italy. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/unhcr-evacuazione-rifugiati-vulnerabili-dalla-libia-allitalia.html>

Agency, T. U. (2018, June 22). Declaration on Europe and asylum of the United Nations High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/dichiarazione-europa-asilo-dellalto-commissario-delle-nazioni-unite-rifugiati-filippo-grandi.html>

Agency, T. U. (2018, November). EUROPE MONTHLY REPORT. Diambil kembali dari UNHCR MONTHLY REPORT: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67726>

Agency, T. U. (2018, November 20). European passport for refugee qualifications in Italy. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/passaporto-europeo-le-qualifiche-dei-rifugiati-italia.html>

Agency, T. U. (2018, December 07). Evacuation of the first group of refugees from the new facility in Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/evacuazione-del-primo-gruppo-rifugiati-dalla-nuova-struttura-libia.html>

Agency, T. U. (2018, June 28). Joint IOM and UNHCR Declaration on the prevention of tragedies in the Mediterranean. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/dichiarazione-congiunta-oim-unhcr-sulla-prevenzione-delle-tragedie-nel-mediterraneo.html>

Agency, T. U. (2018, February 15). Joint UNICEF-UNHCR-OIM-EURSTAT and OECD release: Strong data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and

without access to basic services. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/comunicato-congiunto-unicef-unhcr-oim-eurstat-ocse-forti-lacune-nei-dati-lasciano-pericolo-senza-accesso-servizi-base-bambini-rifugiati-migranti-sfollati.html>

Agency, T. U. (2018). Refugee Status Determination. Diambil kembali dari Protection: <https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html>

Agency, T. U. (2018, January-December). Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders. Diambil kembali dari DESPERATE JOURNEYS: <https://www.unhcr.org/desperatejourneys/>

Agency, T. U. (2018, December 20). REFUGEES PROTAGONISTS OF THEIR INTEGRATION. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/rifugiati-protagonisti-della-integrazione.html>

Agency, T. U. (2018, October 17). UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/appello-unhcr-oim-ai-leader-europei-la-ricerca-soluzioni-alle-morti-nel-mediterraneo.html>

Agency, T. U. (2018, February 15). UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/lunhcr-evacua-oltre-1-000-rifugiati-dalla-libia.html>

Agency, T. U. (2018, May 10). UNHCR resumes emergency evacuations of refugees from Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/lunhcr-riprende-le-evacuazioni-emergenza-rifugiati-dalla-libia.html>

Agency, T. U. (2018, August 03). UNHCR sounds alarm as Mediterranean Sea deaths pass 1,500 mark. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.org/news/press/2018/8/5b6476bd4/unhcr-sounds-alarm-mediterranean-sea-deaths-pass-1500-mark.html>

Agency, T. U. (2018, June 22). UNHCR statement on the wounding of the young Malian

Bouyagui Konate: Italy is committed to promoting concrete actions to prevent intolerance and indifference towards refugees and asylum seekers. Diambil kembali dari News:

<https://www.unhcr.it/news/dichiarazione-dellunhcr-sul-ferimento-del-giovane-maliano-bouyagui-konate-litalia-si-impegna-nella-promozione-azioni-concrete-scongiurare-intolleranza-indifferenza-nei-conf.html>

Agency, T. U. (2018, February 23). UNHCR THANKS THE ITALIAN GOVERNMENT FOR THE CONTRIBUTION OF 9 MILLION EUROS OF FLEXIBLE FUNDS FOR 2018. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/unhcr-ringrazia-governo-italiano-contributo-9-milioni-euro-fondi-flessibili-2018.html>

Agency, T. U. (2018, September 30). UNHCR warns about rescue capacity in the Mediterranean. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/lunhcr-mette-guardia-sulla-capacita-salvataggio-nel-mediterraneo.html>

Agency, T. U. (2018, December 20). UNHCR welcomes the arrival in Italy of 103 refugees evacuated from Libya. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/lunhcr-esprime-soddisfazione-larrivo-italia-103-rifugiati-evacuati-dalla-libia.html>

Agency, T. U. (2018, Desember 15). UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition". Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/lunhcr-accoglie-soddisfazione-lancio-della-coalizione-europea-dei-rifugiati.html>

Agency, T. U. (2018, December 20). UNHCR welcomes the migration agreement. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/lunhcr-accoglie-favore-laccordo-sulle-migrazioni.html>

Agency, T. U. (2018, August 31). UNHCR: evacuation of 300 people at risk in the unstable Libyan capital. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/unhcr-evacuazione-300-persone-detenuite-rischio-nellinstabile-capitale-libica.html>

Agency, T. U. (2018, August 06). UNHCR: exceeded the threshold of 1,500 dead in the Mediterranean. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/unhcr-superata-la-soglia-1-500-morti-nel-mediterraneo.html>

Agency, T. U. (2018, June 19). UNHCR: Land the over 500 survivors without further delay, including the 42 survivors for over 9 days on the high seas. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/unhcr-sbarcare-senza-ulteriori-ritardi-gli-oltre-500-sopravvissuti-fra-quali-42-superstiti-oltre-9-giorni-alto-mare.html>

Agency, T. U. (2018, July 19). UNHCR: Satisfaction with the end of the last stalemate in the Mediterranean, but necessary structured management of relief efforts. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/unhcr-soddisfazione-la-fine-dellultima-situazione-stallo-nel-mediterraneo-necessaria-gestione-strutturata-dei-soccorsi.html>

Agency, T. U. (2018, November 23). With nearly 2,500 people evacuated from Libya, UNHCR calls for more seats for resettlement and an end to detention. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/quasi-2-500-persone-evacuate-dalla-libia-lunhcr-chiede-piu-posti-reinsediamento-la-fine-della-detenzione.html>

Agency, T. U. (2019, September 12). New UNHCR evacuation of refugees from Libya to Italy, as Tripoli fighting continues. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.org/news/press/2019/9/5d7a30584/new-unhcr-evacuation-refugees-libya-italy-tripoli-fighting-continues.html>

Agency, T. U. (2019, August 06). UNHCR concerned at new measures impacting rescue at sea in the Central Mediterranean. Diambil kembali dari News: <https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/8/5d49370e4/unhcr-concerned-new-measures-impacting-rescue-sea-central-mediterranean.html>

Commissions, E. (2015). Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action. *High Representative of The Union For Foreign Affairs and Security Policy*, 2.

Commission, E. (2017, September 6). *European Agenda on Migration: Good Progress in Managing Migration Flows Needs to Be Sustained*. Diambil kembali dari http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3081_en.html

Guterres, A. (2011). Diambil kembali dari The Legal Framework for Protecting Refugees: <https://www.scribd.com/document/95856709/The-1951-Convention-relating-to-the-Status-of-Refugees-and-its-1967-Protocol>

Horowitz, J. (2017, August 4). "Italy's 'Lord of the Spies' Takes on a Migration Crisis". Diambil kembali dari The New York Times: <https://nyti.ms/2huwOTL>

Howden, D. (2017, Desember 7). "The Central Mediterranean: European Priorities, Libyan Realities". Diambil kembali dari <http://issues.newsdeeply.com/central-mediterranean-european-priorities-libyan-realities>

Ministry, I. (2017, Agustus 27). "Migranti, il patto con la Libia frena gli arrivi: da luglio - 68%". Diambil kembali dari Cruscotto statistico giornaliero: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-26/migranti-patto-la-libia-frenaarrivi-221553.html>

Protection, D. o. (2005, August 1). *Self-Study Module 1: An Introduction to International Protection. Protecting Persons of Concern to UNHCR*. Diambil kembali dari UN High Commissioner for Refugees (UNHCR): <https://www.refworld.org/docid/4214cb4f2.html>

Refugees, U. U. (2017, Mei). Diambil kembali dari Expanded Response in Libya 2017: <https://www.unhcr.org/593e9ed47.pdf>

UNHCR. (1997). *Commentary on The Refugee Convention 1951*, p.g 27-28. Diambil kembali dari <https://www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf>

UNHCR, U. N. (1951). Diambil kembali dari Article 1 of the 1951 Convention Relating to The Status of Refugees: <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

UNHCR, U. N. (1997). *Commentary on The Refugee Convention 1951, Articles 2*. Diambil

kembali dari
<https://www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf>

UNHCR. (2014). Diambil kembali dari Protecting Refugees and Role of UNHCR: <https://www.unhcr.org/509a836e9.pdf>

UNHCR. (2017, Mei). Diambil kembali dari Expanded Response in Libya: <https://www.unhcr.org/593e9ed47.pdf>

UNHCR. (2018). (*The UN Refugee Agency*). Diambil kembali dari Italy: <https://www.unhcr.it/dove-siamo/italy>

UNHCR. (2018, August). *UNHCR: What we do in Italy*. Diambil kembali dari UN High Commissioner for Refugees: <https://reliefweb.int/report/italy/unhcr-what-we-do-italy-august-2018>

UNCHR. (2018). *Yemen Emergency*. Diambil kembali dari Emergencies: <https://www.unhcr.org/yemen-emergency.html>

UNHCR. (2018). (*The UN Refugee Agency*). Diambil kembali dari Italy: <https://www.unhcr.it/dove-siamo/italy>

UNHCR. (2018, December 21). *History of UNHCR*. Diambil kembali dari UNHCR: <https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>

UNHCR. (2018, April). *Syria emergency*. Diambil kembali dari Emergencies: <https://www.unhcr.org/syria-emergency.html>

UNHCR. (2018). *Venezuela Emergency*. Diambil kembali dari Emergencies: <https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html>

UNCHR, T. U. (2019, September 13). *News(Press Releases)*. Diambil kembali dari UNHCR High Commissioner appreciates the leadership and solidarity shown in the evacuation of refugees from Libya: <https://www.unhcr.it/news/lalto-commissario-unhcr-apprezza-leadership-e-solidarieta-dimostrate-nellevacuazione-di-rifugiati-dalla-libia.html>

Website:

Bonfati, P. F. (2017). When the best option is a leaky boat: why migrants risk their lives crossing the Mediterranean and what Europe is doing

about it. Diambil kembali dari Migration Policy Centre: <http://cadm>

CO-OPERATION, O. F. (2018). Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. Diambil kembali dari Regional Policy:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/do-cgener/studies/pdf/local_integration.pdf

Curreli, A. (2011, February 22). The repatriated association: "Gaddafi? A man who has unnecessarily ruined the lives of Italians in Libya". Diambil kembali dari Tiscali: Interviste: http://arch*ivio.notizie.tiscali.it/articoli/interviste/11/02/libia-storia-italiani-intervista-ortu.html?redirect=true

Government, I. (2016, April 15). Migration Compact: Contribution to an EU Strategy for External Action on Migration. Diambil kembali dari <http://www.governo.it/node/4509>

Information, N. C. (2018). Migrants' and refugees' health: towards an agenda of solutions. Diambil kembali dari US National Library of Medicine National Institute of Health:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182765/>

INTEGRATION, E. W. (2017). Governance of Migrant Integration in Italy. Diambil kembali dari Migrant Integration Information and good practices: <https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/italy>

Italia, K. d. (2014). Migration Phenomenon. Diambil kembali dari Dipartimento della Pubblica Sicurezza: <https://www.refworld.org/pdfid/5a5f57074.pdf>

John, R. B. (2014, June 4). Italians Expelled from 1970 Libya. Diambil kembali dari Historical Dictionary of Libya: https://books.google.co.id/books?id=xIrOAwAAQBAJ&pg=PA173&lpg=PA173&dq=italians+expelled+from+1970+libya&source=bl&ots=EnhUCJf4V3&sig=4PdOJ-DdcK6-t_v72IDltPqqrDY&hl=en&sa=X&ei=dhZIVO-xAsnDggSjhoDIBA&redir_esc=y#v=onepage&q=italians%20expelled%20from%2019

Molinari, B. (2017, December 23). Groundbreaking first evacuation of 162 vulnerable refugees from Libya to Italy.

Diambil kembali dari UNHCR-News:
<https://www.unhcr.org/news/latest/2017/12/5a3e3d155/groundbreaking-first-evacuation-162-vulnerable-refugees-libya-italy.html>

Parliament, E. (2017). Integration of Refugees in Greece, Hungary, and Italy: Country Case Study Italy. Diambil kembali dari Policy Department-Employment and Social Affairs:
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614194/IPOL_STU\(2017\)614194\(ANN03\)_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614194/IPOL_STU(2017)614194(ANN03)_EN.pdf)

PROGRAMME, E. C. (2012, June 2). LOCAL INTEGRATION AND SELF-RELIANCE. Diambil kembali dari UNHCR-THE UN REFUGEE AGENCY:
<https://www.unhcr.org/excom/standcom/42a0054f2/local-integration-self-reliance.html>

Secretariat, S. (2017, Februari 22). Resettlement Information for Asylum Seeker and Refugee. Diambil kembali dari SUAKA:
<https://suaka.or.id/2017/02/22/resettlement-information-for-asylum-seeker-and-refugee/>

Sunderland, J. (2018, September 26). New Low for Italian Migration Policies: Preventing Rescue at Sea, Punishing Survivors on Land. Diambil kembali dari Human Rights Watch:
<https://www.hrw.org/news/2018/09/26/new-low-italian-migration-policies>.